

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
PERIODE OKTOBER 2020 - DESEMBER 2020**



TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Pandeglang,
Pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020



Top Manager,

Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Koordinator Tim Survei,

Mulyana, S.H.

Ketua Tim Survei,

Titis Tri Wulandari, S.H. S.Psi., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Pandeglang,
Pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020

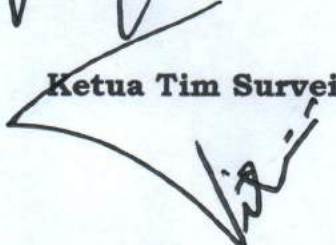
Top Manager,


Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Koordinator Tim Survei,


Mulyana, S.H.

Ketua Tim Survei,


Titis Tri Wulandari, S.H. S.Psi., M.Hum.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II.....	5
METODOLOGI.....	5
2.1. Metode Penelitian.....	5
2.2. Populasi Dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	19
BAB IV.....	21
PENUTUP.....	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi.....	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Pandeglang untuk periode Oktober - Desember 2020 ini telah selesai.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pandeglang mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi ini dapat diartikan bahwa Instansi Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II Bersih dari Praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Indeks Persepsi Korupsi dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini dapat berguna, khususnya bagi Pengadilan Negeri Pandeglang dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pandeglang, 18 Desember 2020
Ketua Tim Survei

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi proyek percontohan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pandeglang.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 2 (dua) bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks

Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

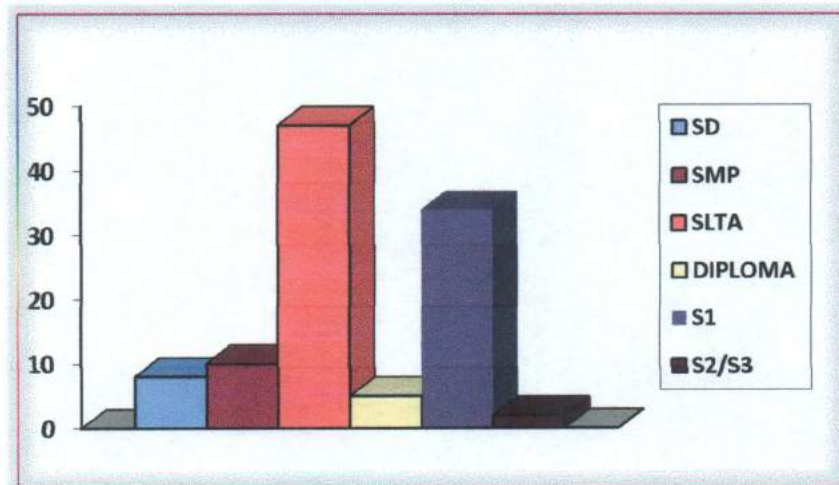
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

Tabel 4.

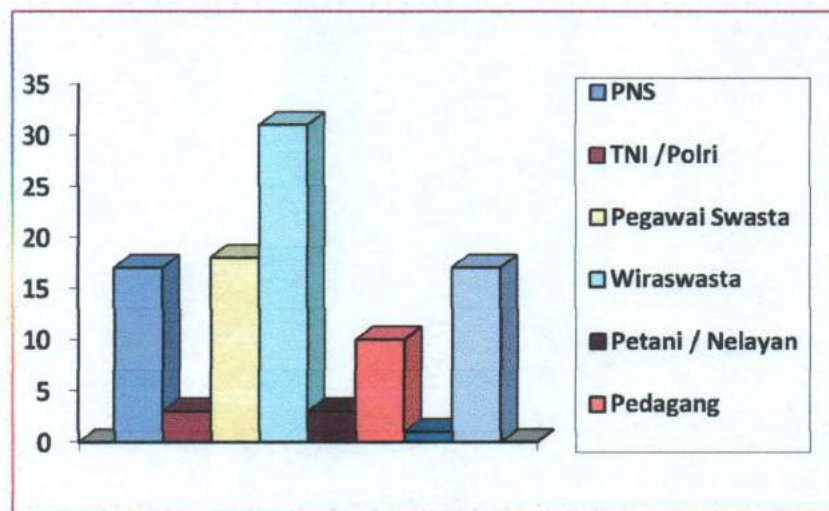
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 41% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki pekerjaan sebagai Lainnya.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden



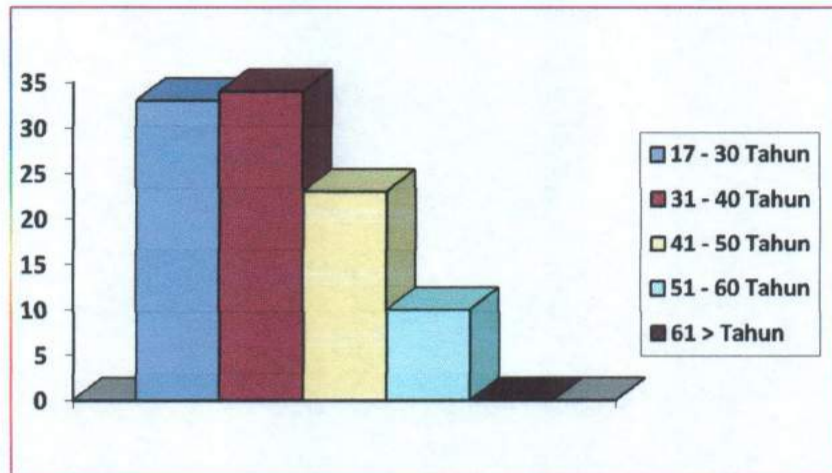
3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, tidak diperoleh data berdasarkan domisili dikarenakan dalam daftar kuisisioner tidak mencantumkan data Domisili yang harus diisi oleh responden.

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 31 tahun s/d 40 tahun. Bagi kelompok usia di atas 51 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 31 tahun.

Tabel 7.
Usia responden



3.1.5. Layanan yang digunakan

Dari data yang terkumpul selama survei, tidak diperoleh data Layanan yang digunakan dikarenakan dalam daftar kuisioner tidak mencantumkan layanan yang digunakan oleh responden.

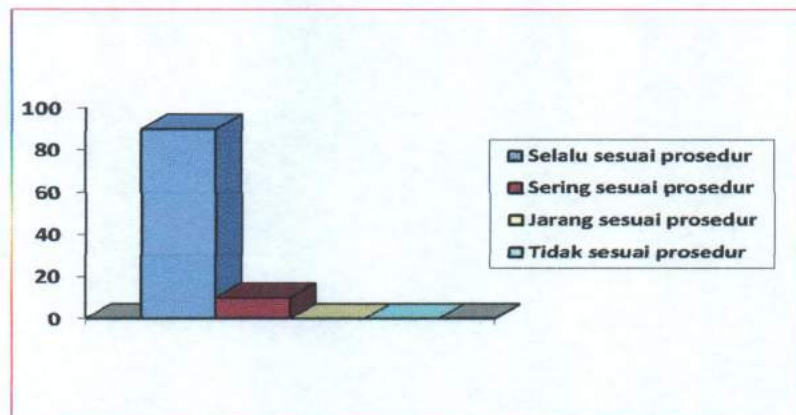
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,90**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Manipulasi Peraturan**

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

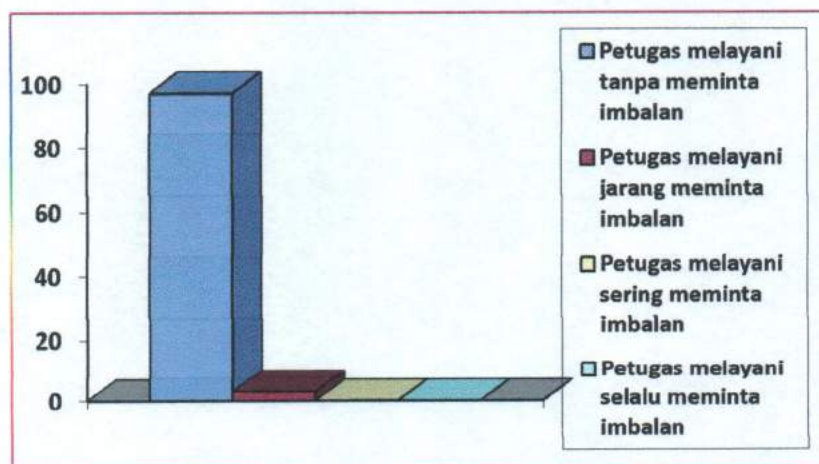


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,97**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Penyalahgunaan Jabatan**

Tabel 10.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



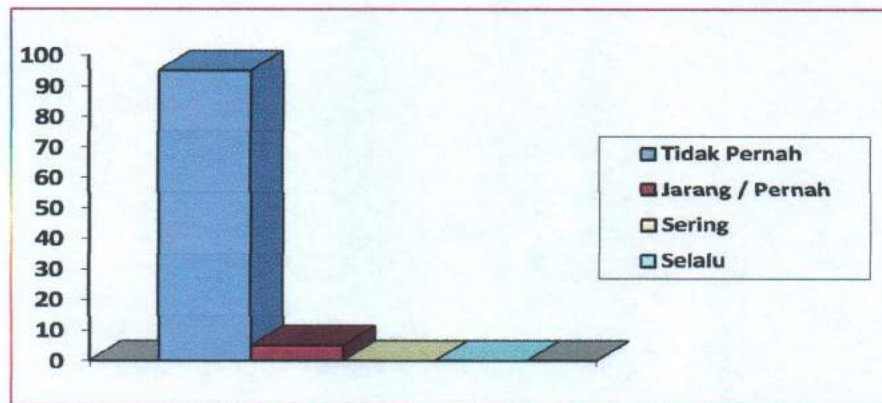
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,95**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Menjual Pengaruh**

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

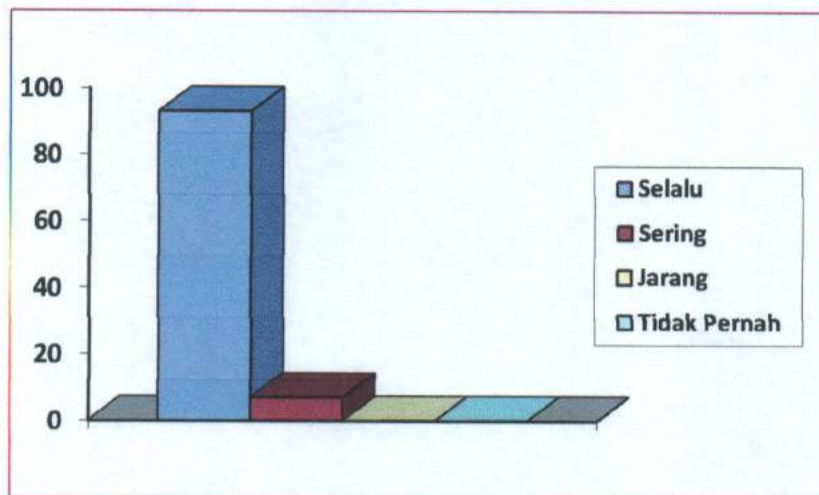


3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,93**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang baik dari **Transparansi Biaya**

Tabel 12.
Indeks pada indikator transparansi biaya

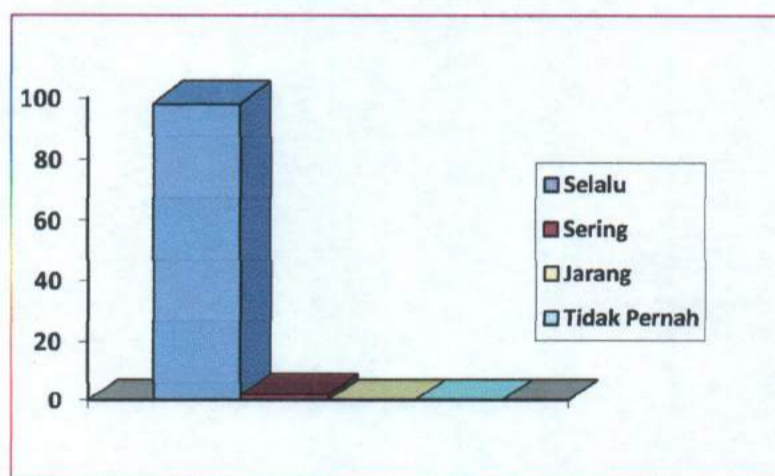


3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,98**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Biaya Tambahan**.

Tabel 13.
Indeks pada indikator tambahan biaya



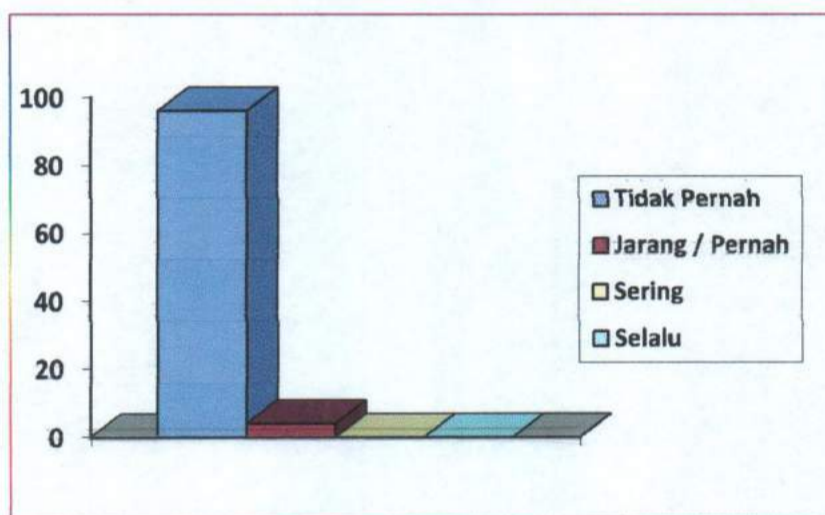
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,96**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Menerima Hadiah**.

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah

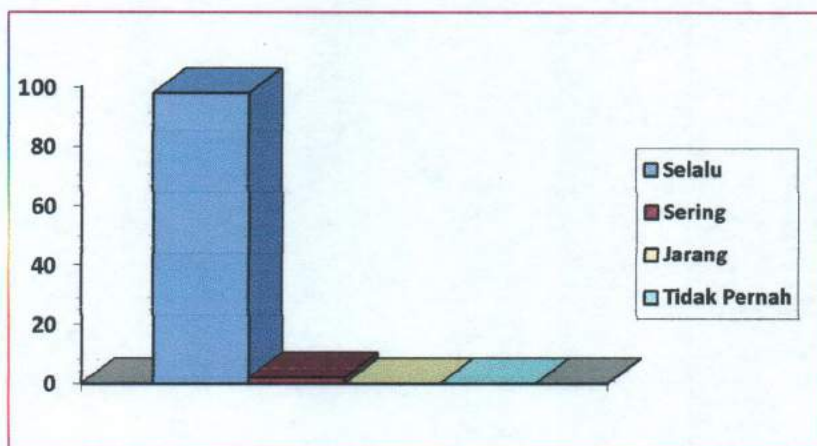


3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,95**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Transparansi Pembayaran**.

Tabel 15.
Indeks pada indikator transparansi pembayaran

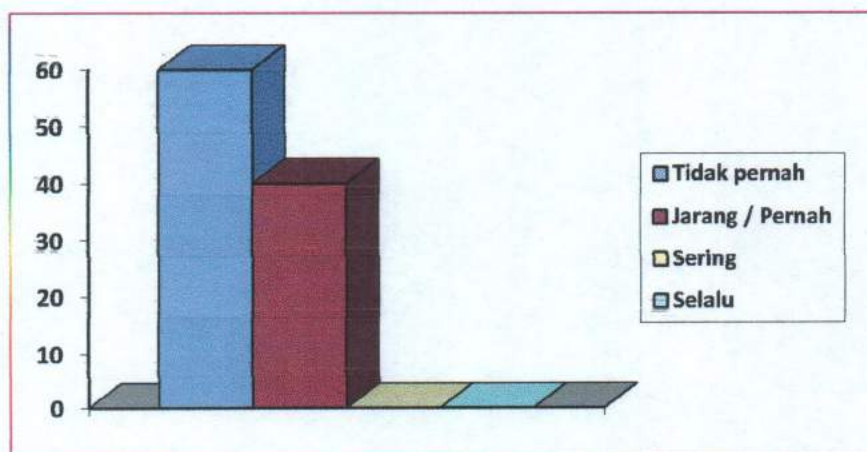


3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,60**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang **bersih dari tindakan Percaloan**.

Tabel 16.
Indeks pada indikator percaloan



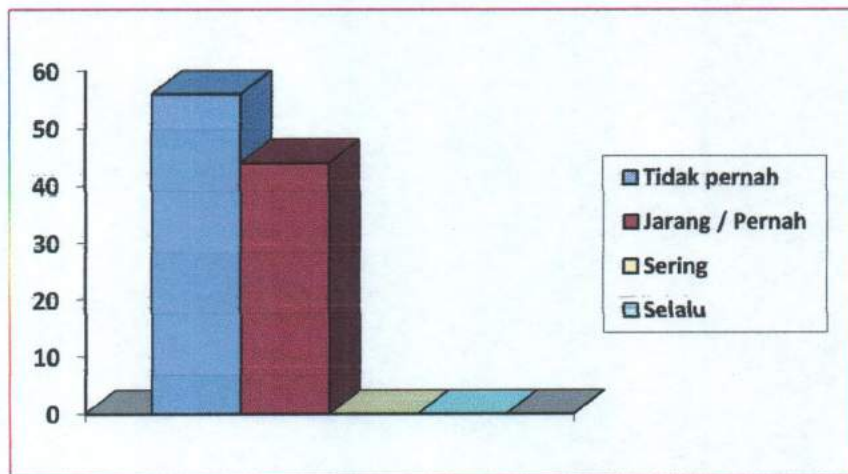
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,60**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Perbuatan Curang**.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang



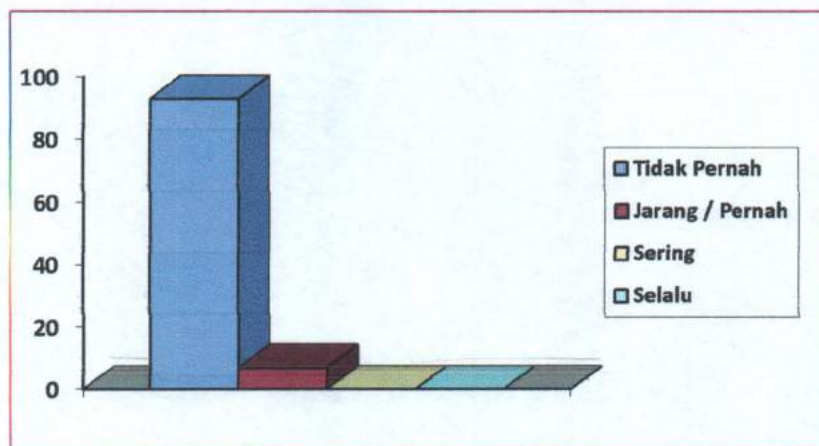
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3,93**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Transaksi Rahasia**.

Tabel 18.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

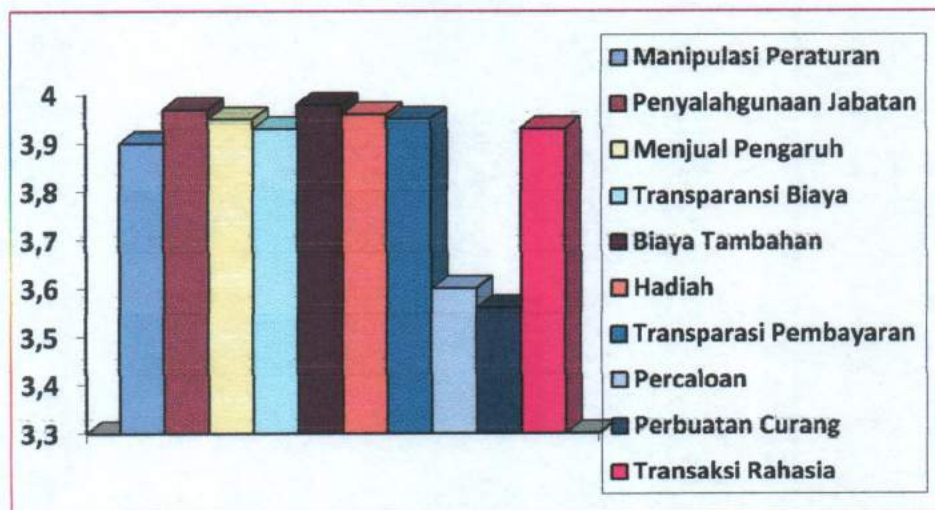


3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang sebesar **96,93**.

Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang



Indeks **96,93** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **81.26 - 100.00**

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Pandeglang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang.

Adapun untuk masukan dan pandangan dari responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang tidak ada, dikarenakan dalam daftar kuisisioner tidak mencantumkan masukan dan pandangan responden pengguna layanan yang harus diisi oleh responden.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Pandeglang memiliki Indeks Persepsi Korupsi **96,93** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,90
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,97
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,95
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,93
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,98
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,96
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,95
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,60
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,60
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,93

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di rata-rata 3,88 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Percaloan dan Perbuatan Curang masih memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGOLAHAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Unit Pelayanan : PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
 Alamat : JL. RAYA SERANG KM 1 CURUGSAWER PANDEGLANG
 Periode : Ke 3 (Oktober-Desember 2020)

No. Responden PN Pandeglang	NILAI UNSUR PELAYANAN										Keterangan		
	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	U 10			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4			
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4			
3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
6	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4			
8	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4			
9	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4			
10	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
12	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
13	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
14	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
15	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
16	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3			
17	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
18	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
19	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
20	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
21	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
25	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3			
26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3			
27	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4			
28	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3			
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
31	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
32	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			
33	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4			

78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
79	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4				
80	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4				
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
82	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4				
83	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4				
84	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4				
85	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4				
86	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4				
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
88	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4				
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
93	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4				
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
96	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
97	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4				
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
99	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4				
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	390	397	395	393	398	396	395	360	360	393	0	0	0	
N.Rata-rata	3,90	3,97	3,95	3,93	3,98	3,96	3,95	3,60	3,60	3,93	0,00	0,00	0,00	
NRR Tertimbang	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,36	0,36	0,39	0,00	0,00	0,00	3,88
														25
														0,1
														96,93

Sangat Baik

Keterangan :

- U1 - U14 : Unsur-unsur pelayanan
- NRR** : **Nilai Rata-rata**
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
- ***) : Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Tertimbang : NRR per unsur x 0.071 Per Unsur

IPK UNIT PELAYANAN : 96,93

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,90
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,97
U3	Menjual Pengaruh	3,95
U4	Transparasi Biaya	3,93
U5	Biaya Tambahan	3,98
U6	Hadiah	3,96
U7	Transparasi Pembayaran	3,95
U8	Percaloan	3,60
U9	Perbuatan Curang	3,60
U10	Transaksi Rahasia	3,93

Mutu Pelayanan	Kategorisasi Pelayanan
A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00	= 3,26 - 4,00 = 4
B (Baik) : 62,51 - 81,25	= 2,51 - 3,25 = 3
C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50	= 1,76 - 2,50 = 2
D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75	= 1,00 - 1,75 = 1

PROFIL RESPONDEN

A. UMUR

No	Umur	Jumlah	%
1	17 - 30	12	12,00%
2	31 - 40	45	45,00%
3	41 - 50	40	40,00%
4	51 - 60	3	3,00%
5	> 61	0	0,00%
6	Tidak mencantumkan	0	0,00%
Jumlah		100	100,00%

B. JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	70	70,00%
2	Perempuan	30	30,00%
3	Tidak mencantumkan	0	0,00%
Jumlah		100	100,00%

C. PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	0	0,00%
2	SLTP	6	6,00%
3	SLTA	72	72,00%
4	D1 - D 3 - D 4	0	0,00%
5	S1	19	19,00%
6	S2 - S3	3	3,00%
7	Tidak mencantumkan	0	0,00%
Jumlah		100	100,00%

D. PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS / TNI / POLRI	3	3,00%
2	Pegawai Swasta	18	18,00%
3	Wiraswasta	30	30,00%
4	Pelajar / Mahasiswa	8	8,00%
5	Lainnya	41	41,00%
6	Tidak mencantumkan	0	0,00%
Jumlah		100	100,00%